



MAHASISWA MERDEKA DARI SKRIPSI, TAPI...

Permendikbudristek Baru: Tesis dan Disertasi Tak Wajib Jurnal

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan transformasi di bidang pendidikan. Salah satunya, kini mahasiswa S1 dan D4 tidak lagi wajib menyusun skripsi. Sementara, tesis dan disertasi mahasiswa S2 dan S3 (magister dan doktoral) juga tak harus masuk jurnal. Selain itu, Indeks prestasi atau IP tidak lagi jadi satu-satunya bentuk penilaian mata kuliah. Namun, kini ada bentuk lulus atau tidak lulus (pass/fail). Semua aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Namun perlu digarisbawahi, tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku agar mahasiswa 'merdeka' dari skripsi. Syaratnya, prodi mahasiswa bersangkutan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sejenis. Bagi mahasiswa kampus yang belum menerapkan kurikulum tersebut, skripsi bisa diganti tugas akhir berupa prototipe, proyek, maupun bentuk sejenis lainnya. Tak perlu pusing sendiri, dalam aturan baru, tugas akhir ini juga dikatakan dapat dikerjakan secara berkelompok.

(Baca Hal 11)

ATURAN BARU

- Kompetensi tidak dijabarkan secara rinci lagi
- Perguruan tinggi bisa merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi
- Tugas akhir bisa berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi
- Jika program studi sarjana atau sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau dalam bentuk sejenis, maka tugas akhir tidak lagi bersifat wajib
- Mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, maupun doktor terapan wajib diberi tugas akhir, tetapi tidak wajib terbit di jurnal

ATURAN LAMA

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci
- Mahasiswa sarjana atau sarjana terapan wajib membuat skripsi
- Mahasiswa magister atau magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi
- Mahasiswa doktor atau doktor terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.

ATURAN BARU BAGI MAHASISWA

(Berdasarkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Berita lanjutan di hal 11...



Government (Hal.2)
Jaga Harga
Eceran Tertinggi,
Bulog Rilis
Beras Kemasan
Mini

Jaga Harga Eceran Tertinggi, Bulog Rilis Beras Kemasan Mini

JAKARTA- Kenaikan harga beras belum berhenti. Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional pada 29 Agustus 2023, harga beras premium terpantau naik 4,83 persen menjadi Rp14.550 per kilogram. Harga beras medium juga tercatat naik sebesar 2,54 persen menjadi Rp12.520 per kilogram. Angka ini tentu makin jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Perum Bulog berencana mengedarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau kemasan mini 1 kilogram (kg). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras tersebut bisa menjadi opsi bagi masyarakat yang kesulitan membeli kemasan 5 kg seharga Rp47 ribu.

"Jadi ini nanti akan disikapi oleh Bulog, Bulog juga akan membuat packaging yang 1 kg jadi masyarakat yang nanti tidak bisa membeli 5 kg, kami akan berikan yang nanti 1 kg," ucapnya di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur seperti dikutip, Selasa (29/8/2023).

Adapun harga beras Bulog sesuai harga eceran tertinggi (HET) adalah Rp9.450 per kg. Artinya harga beras kemasan mini 1 kg nantinya akan dijual di bawah Rp10 ribu.

Buwas menuturkan sebenarnya pihaknya sudah memiliki kemasan 1 kg. Namun, kemasan tersebut belum diedarkan. Ia menargetkan kemasan 1 kg itu bisa segera didistribusikan ke pasar-pasar secepatnya.

Sementara, saat ini Bulog masih fokus untuk menyalurkan beras murah kemasan 5 kg. Menurut Buwas, kemasan itu masih menjadi kebutuhan masyarakat.

"Nanti kalau di warung-warung yang butuh 1 kg. Dulu kan saya pernah buat juga sama yang 250 gram itu sudah saya buat tapi ternyata masyarakat tidak membutuhkan itu. Nah sekarang mungkin butuh itu bisa



Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 1 kilogram (kg) seharga Rp9.450 dari Bulog. (ist)

kita adakan lagi," imbuhnya.

Perum Bulog tengah mendapatkan tugas untuk menyalurkan beras murah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengintervensi harga beras yang tengah naik. Intervensi itu dengan melakukan operasi pasar yang kini programnya dinamakan beras SPHP. Beras yang didistribusikan dengan kemasan 5 kg itu harganya Rp47 ribu dan kualitasnya diklaim setara premium.

Distribusi beras SPHP itu saat ini tidak hanya di pasar induk, tetapi juga didistribusikan langsung ke pengecer di pasar tradisional. Perum Bulog juga memperluas distribusinya ke ritel-ritel modern.

Menkeu Pun Keluhkan Komoditas Pangan

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai fluktuasi harga komoditas dunia, baik pangan maupun energi. Menurutnya, harga komoditas seperti pangan dan energi dunia sulit untuk diprediksi

karena volatilitas yang terjadi saat ini dipicu dari kondisi geopolitik dunia, hingga aktivitas perekonomian global yang tidak menentu.

"Harga pangan dan energi sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global dan geopolitik. Ini karena sekarang banyak sekali embargo pada produk-produk terutama energi dari suatu daerah atau Kawasan," tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa (29/8/2023).

Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.

"Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejala harga pangan, peningkatan produktivitas dan keadilan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani.

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menjelaskan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan

pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek, yakni peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.

Selain itu, juga melalui pengembangan Kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan penguatan cadangan pangan nasional.

Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan ke depan. Komitmen tersebut diwujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2024 yang dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia, ASEAN juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan untuk mendongkrak ketahanan pangan di kawasan, baik pada level regional maupun global. Komitmen tersebut diungkapkan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Penguatan kolaborasi diwujudkan melalui proses keuangan ASEAN serta badan-badan sektoral ASEAN lainnya. Dengan melibatkan kolaborasi lintas sektoral, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menargetkan perbaikan kebijakan yang dapat mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat yang lebih merata.

Selain itu meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta petani kecil, serta meningkatkan fasilitas perdagangan untuk mendorong ketahanan pangan di kawasan. (wid,rls,ist/dya)

TREN KENAIKAN HARGA BERAS

21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 28/8 29/8

Beras kualitas bawah	12,550	12,550	12,600	12,550	12,600	12,650	12,600
Beras Kualitas Medium	13,700	13,700	13,750	13,850	13,750	13,850	13,800
Beras Kualitas Super	14,950	14,950	15,000	15,050	15,050	15,150	15,100

Terima Ribuan Aduan Rakyat, DPR: Didominasi Hukum HAM Hingga Pertanian

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, telah menerima 4.603 aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website. 'Wadul' masyarakat tersebut didominasi Hukum, HAM dan Keamanan hingga Pertanian dan Reformasi Agraria.

"Terdapat lima bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu Hukum, HAM dan Keamanan, Pertanian dan Reformasi Agraria, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN, Ekonomi Keuangan serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).

Untuk diketahui, DPR genap berusia 78 tahun pada Selasa (29/8/2023). Dalam pidatonya, Puan mengungkapkan bila dewan legislatif telah mendapatkan ribuan aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Mengusung tema 'DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju', DPR telah memiliki sejumlah capaian. Puan merinci beberapa capaian dewan dalam masa kerja tahun 2022-2023, termasuk dalam fungsi legislasi di mana DPR telah sukses menyelesaikan 23 Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang.

"Kemudian 16 Rancangan Undang Undang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 5 RUU diantaranya adalah RUU Kumulatif terbuka dan 46 RUU sedang dalam tahap penyusunan. Sebanyak 29 RUU di antaranya adalah RUU kumulatif terbuka," jelas mantan Menko PMK itu.

"Dalam proses pembentukan Undang-Undang, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi," sambungnya.

Terkait perkara pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 130 perkara pengujian UU sepanjang Tahun Sidang 2022-2023. Puan menjelaskan, dari jumlah tersebut hanya 13 perkara yang putusannya dikabulkan oleh MK.

"Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara," tegasnya.

Sementara itu dalam kinerja anggaran, Puan melaporkan DPR bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Menurut Puan, APBN sebagai

instrumen keuangan negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional.

"Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang Undang APBN beserta Kebijakan Fiskalnya," ungkap Puan.

Puan menambahkan, DPR bersama Pemerintah pada masa persidangan ini tengah melaksanakan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Ia pun menyatakan pihaknya akan memastikan bahwa APBN mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

21 dari 50 Panitia Kerja Dinyatakan Selesai

Puan juga mengungkap fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan DPR di mana lembaga legislatif tersebut telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

"Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Panitia Kerja, Panitia Khusus Pengawasan, Tim Pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 Panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 di antaranya telah dinyatakan selesai," tutur Puan.

Lebih lanjut, DPR pun telah menjalankan peran diplomasi parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antar-parlemen dan non-parlemen. Puan menyebut, diplomasi parlemen itu dilakukan baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.

"Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global," pungkasnya.

Dalam Rapat Paripurna hari ini, Puan mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kepada tiga anggota

dewan yang telah wafat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI. Ketiganya adalah, Muhammad Rapsel Ali, Desmond Junaidi Mahesa dan Bambang Kristiono.

Setelah penyampaian pidato, Puan lalu menyampaikan buku laporan kinerja DPR kepada ketua BPK RI Isma Yatus, Ketua KY Amzulian Rifai, pimpinan MPR RI yang diwakili Ketua MPR Ahmad Basarah, pimpinan DPD RI diwakili Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan Hakim Agung Syamsul Maarif yang mewakili MA. Buku laporan kinerja juga diberikan Puan kepada ketua DPR periode sebelumnya yang diwakili oleh Agung Laksono dan kepada ketua-ketua fraksi DPR RI saat ini. (wid,rls,ist/dya)

42 RUU MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2023

USULAN DPR

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
26. Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman.

USULAN PEMERINTAH

27. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
31. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
32. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
33. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
34. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
35. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
36. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
37. Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
38. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai
39. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

USULAN DPD

40. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
41. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
42. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.



Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan buku laporan kinerja DPR kepada ketua DPR periode sebelumnya yang diwakili oleh Agung Laksono dalam Rapat Paripurna Khusus Tahun 2022-2023 tentang Penyampaian Laporan Kinerja dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 DPR RI. (Foto: DPR RI)

Tiga Sekolah di Bekasi Disegel Ahli Waris, Pemkot Wajib Bayar Rp 19 Miliar

BEKASI - Tiga sekolah dasar di Bantargebang, Bekasi disegel. Pasalnya, Pemkot Bekasi dinilai tidak memenuhi hasil sengketa dimana Pemkot Bekasi harus membayar Rp 19 miliar sesuai dengan keputusan pengadilan.

Ketiga sekolah dasar negeri yang disegel itu adalah SDN III Bantargebang, SDN IV Bantargebang, dan SDN V Bantargebang, Kota Bekasi.

Di SDN V Bantargebang, dipasang pagar seng sepanjang sekitar sepuluh meter dan tinggi 1,8 meter menutup akses masuk halaman sekolah. Hal itu membuat siapa pun tidak bisa masuk ke area dalam sekolah, seperti ruang kelas.

Terdapat selembur kertas yang ditempel di tengah pagar seng. Kertas itu bertuliskan "Sekolah Ini Dibuka (Lagi) Setelah Walikota Membayar Hak Ahli Waris, Dilarang Merusak, Membuka, Melintasi Pagar Pembatas Ini".

Selain itu, terdapat spanduk yang ditempel di tembok sekolah disegel bertuliskan "Tanah Milik Ahli Waris H. M. Nurhasanuddin Karim" sesuai putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung, Kasasi Mahkamah Agung RI, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.

"Tanah tiga SD ya, saya enggak megang data, tetapi kurang lebih untuk SD IV itu sekitar 1.900 meter persegi, untuk SD V itu 1.000 meter persegi, untuk SD III itu 500 meter persegi. Nominalnya kurang lebih Rp 19 miliar," kata kuasa hukum ahli waris, Andri Sihombing, dikutip dari tempo.co Selasa (29/8/2023).

Andri menjelaskan sebenarnya pihak Pengadilan Negeri Bekasi sudah menegur Pemkot Bekasi untuk melakukan pembayaran kepada ahli waris pada 2 Agustus 2023. Pemkot Bekasi diberi waktu delapan hari oleh pihak Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pembayaran, namun tak dilaksanakan.

Pembayaran yang tak kunjung dilakukan Pemkot Bekasi itu berujung pada penyegelan tiga sekolah oleh ahli waris. "Jangan sampai enggak ada kepastian hukum, kan. Tugas saya mengedepankan hak hukum klien, kan, begitu, jangan pula jadi diombang-ambingkan," ujar Andri.

Adapun permasalahan sengketa lahan itu terjadi sejak 2003. Proses mediasi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan ahli waris selalu gagal menemui titik terang. Pada 2020, pihak ahli waris membawa permasalahan itu ke ranah hukum.

Persidangan terus berlangsung hingga pada 2022 keluar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang dimenangkan pihak ahli waris. Pihak pemkot juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Putusan PK Mahkamah Agung pun lagi-lagi dimenangkan pihak ahli waris pada April 2023.



Akses Sekolah Dasar (SD) Negeri V Bantargebang, Kota Bekasi, ditutup pagar seng oleh pemilik tanah atau ahli waris, Senin (28/8/2023). Pemilik tanah menuntut Pemerintah dalam hal ini kepada Walikota Kota Bekasi, Tri Adhianto untuk membayar haknya. Karena pemagaran itu, pihak sekolah telah mengganti sistem pembelajaran tatap muka (PTM) dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para siswa. (KOMPAS.com/FIRDA JANATI)

"Terus kemudian bulan Agustus itu pemkot sudah ditegur kepala pengadilan untuk melaksanakan putusan yang sudah inkrah untuk bayar," ujar Andri.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi mengatakan penyegelan itu membuat siswa tiga sekolah tersebut sempat terpaksa belajar secara daring dari rumah masing-masing.

Pemkot Bekasi dan ahli waris pun telah bernegosiasi sehingga penyegelan dengan pagar seng telah dibuka pihak ahli waris. Pemkot Bekasi telah berjanji segera memproses pembayaran lahan kepada ahli waris.

"Yang sekarang sedang kami negosiasikan dengan ahli waris adalah cara pembayaran dan waktu pembayaran," ujar Deded saat dikonfirmasi wartawan.

Di satu sisi, Pemkot Bekasi menurunkan tim untuk bernegosiasi dengan ahli waris yang melakukan penyegelan terhadap tiga sekolah dasar (SD) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Deded Kusmayadi menyampaikan, ada tiga sekolah yang disegel oleh ahli waris.

Pihak ahli waris mengklaim, semua sekolah tersebut berdiri di lahan milik mereka. "Di antaranya SDN 3, 4, dan 5 Bantargebang," kata Deded, dikutip dari tribune, Selasa (28/8/2023).

Deded menyebut pihak ahli waris bersangkutan tidak sabar sehingga mengambil keputusan menyegel tiga sekolah tersebut. "Lagi berproses, mungkin tidak sabar, akhirnya dilakukan penyegelan oleh SDN Bantargebang," kata dia.

Deded menuturkan, Pemkot saat ini masih dalam proses pengajuan dana untuk membayar ganti rugi. Baca juga: Ahli Waris Segel 3 SDN di Bantargebang, Sebut Pemkot Bekasi Lari dari Tanggung Jawab "Sekarang

memikirkan bagaimana cara pembayaran, sedang berproses," ucapnya.

Menurut Deded, setelah mengetahui ketiga sekolah itu disegel, Pemkot Bekasi langsung melakukan komunikasi dengan para ahli waris untuk bernegosiasi. Adapun negosiasi dilakukan oleh lurah, camat, dan Disdik Kota Bekasi hingga membuat ahli waris rela membuka segel yang sudah dipasang pada Senin (28/8/2023).

Dengan begitu, kini sekolah tersebut tetap bisa menjalankan proses belajar mengajar. "Kami negosiasi terhadap ahli waris yang melakukan pengembokan, minta dibuka gemboknya, akhirnya bisa dibuka," ucap Deded.

Adapun tiga SDN yang disegel dipasang spanduk "Sekolah akan dibuka kembali setelah hak ahli waris dibayar".

Wali Kota Kota Bekasi Tri Adhianto pada saat itu menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi akan membayar uang ganti rugi kepada ahli waris pemilik lahan. Namun, pada November 2022, Pemkot tiba-tiba mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Jadi kami melihatnya dia hanya mengulur-ngulur waktu saja, menghindari tanggung jawabnya," ucap Andri. Ujungnya, pada April 2023, permohonan PK yang diajukan Pemkot Bekasi tak dikabulkan MA.

Guru dan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) V Bantargebang di Kota Bekasi kaget ketika sekolah disegel dengan pagar seng oleh ahli waris. Kepala SDN V Bantargebang Aisyah mengatakan para siswa syok akibat penyegelan yang terjadi sejak Minggu (27/8/2023).

"Kami bukan kaget lagi, syok berat bagi guru, orang tua, siswa, semuanya," kata Aisyah saat dikonfirmasi wartawan di sekolah, Senin (28/8/2023).

Aisyah menjelaskan penyegelan

oleh ahli waris itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa diketahui pihak sekolah. Sebenarnya pihak sekolah sudah mencoba menghubungi ahli waris, namun belum ada jawaban.

"Saya sudah komunikasi ke pihak Dinas Pendidikan, kalau untuk ke Wali Kota kan bukan wewenang saya," ucap dia.

Kepala sekolah mengatakan ratusan siswa SD Negeri V Bantargebang itu terpaksa belajar secara online dari rumah masing-masing akibat penyegelan tersebut.

"Anak-anak PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) sekarang, mudah-mudahan enggak lama lah, tadi juga sudah dikomunikasikan," ujar Aisyah.

Pihak sekolah pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Saya sekadar koordinasi dengan kepala dinas. Kami bukan kecewa lagi yah, sudah luar biasa," ujar Aisyah. (lut/dya)

“

Tanah tiga SD ya, saya enggak megang data, tetapi kurang lebih untuk SD IV itu sekitar 1.900 meter persegi, untuk SD V itu 1.000 meter persegi, untuk SD III itu 500 meter persegi. Nominalnya kurang lebih Rp 19 miliar,"

ANDRI SIHOMBING
kuasa hukum ahli waris

Jakpro Bongkar Ganti Rumput JIS

JAKARTA - rumput Jakarta International Stadium (JIS) akhirnya dibongkar dan diganti dengan yang baru yang sesuai rekomendasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dalam rangka penyelenggaraan Piala Dunia U-17 yang berlangsung 10 November - 2 Desember 2023. Penggantian dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Rumput lapangan JIS diganti total dengan rumput baru sesuai dengan standar FIFA," kata Tenaga Ahli Jakpro Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/8/2023) dikutip dari Antara.

Wisnu menuturkan pembongkaran rumput dari yang lama menjadi baru merupakan bagian dari perbaikan fasilitas dan akses stadion demi kenyamanan pengunjung.

Selain perbaikan rumput, Dinas Bina Marga DKI Jakarta memperbaiki jalan di sekitar JIS untuk memudahkan akses masuk dan keluar jalan tol.

Dalam kesempatan itu, pihaknya kepada wartawan membagikan gambar dan video terbaru terkait dengan perkembangan perbaikan JIS berupa pembongkaran rumput di setiap sudut.

"Seluruh proses penggantian rumput sedang berjalan (on progress). Kami sudah melakukan berbagai macam penelitian dengan jenis-jenis rumput lain di beberapa tempat," terangnya.

Dia mengklaim Jakpro secara bertahap akan terus mempersiapkan JIS agar pada saatnya siap menjadi lokasi pelaksanaan Piala Dunia U-17.

Sebelumnya, Manajemen Jakpro menyatakan renovasi atau perbaikan rumput Jakarta International Stadium (JIS) tak menggunakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD DKI Jakarta 2023. "Enggak, enggak, enggak (pakai PMD). (Pakai) Jakpro," kata Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin saat ditemui di Jakarta.

Iwan memastikan pergantian rumput itu akan menggunakan keuangan dari internal Jakpro termasuk segala persiapan menjelang Piala Dunia U-17 pada November-Desember 2023. Menurut Iwan, pihaknya sudah memiliki dana untuk pengembangan fasilitas dalam stadion sehingga tidak akan menggunakan PMD.

Kendati demikian, saat ditanyakan rincian anggaran yang digunakan pihaknya tak bisa menyebutkan karena masih dianalisa. "Kalau anggaran, kan, kita selalu ada untuk pengembangannya. Kan harus ada, sudah siap," ujar Iwan.

Sebelumnya, dilansir dari detik, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyoroti rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang tidak memenuhi standar FIFA. Ahli agronomi untuk stadion, Qamal Mustaqim mengatakan masalah rumput di JIS karena ditanam di karpet sintetis.

"Rumput ini jenisnya japonica, cuma ditanamnya di karpet sintetis, ini



Ilustrasi stadion JIS (Foto : Istimewa)

yang jadi masalah hanya itu aja. Medianya terlalu dangkal sehingga akar tidak tembus ke bawah," kata Qamal, kepada wartawan di JIS, Selasa (4/7/2023) seperti dilansir detikNews.

Qamal merupakan Chairman Karya Rama Prima (KaerPe). Dia pernah menangani rumput di Stadion GBK untuk Asian Games 2018. Qamal turut hadir di JIS saat peninjauan dilakukan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Lebih lanjut, Qamal mengatakan rumput merupakan makhluk hidup yang butuh paparan sinar matahari penuh dan air. Dia mengatakan rumput di JIS tak semuanya terkena paparan sinar matahari. "Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal, mataharinya tidak cukup, itu saja masalahnya," ucap Qamal.

Dia menuturkan, jenis rumput japonica butuh paparan sinar matahari 8 jam sehari. Sementara di sisi selatan JIS hanya setengahnya yang terpapar matahari. "Yang daerah sisi selatan itu hanya setengahnya saja dari jam 9 (pagi) sampai jam 2. Selebihnya tidak kena matahari, itu saja masalahnya di sini," lanjut dia.

Qamal mengatakan untuk jangka pendek, solusi yang paling mungkin dilakukan dengan pemindahan lapangan yang sudah jadi dari lapangan golf. "Solusinya sudah kita usulkan ke Pak Menteri bahwa yang bisa dilakukan memindahkan lapangan yang sudah jadi, salah satunya dari lapangan golf. Yang mungkin kalau Bapak-Ibu mengikuti pekerjaan kami di GBK, Asian Games

2018 itu memindahkan lapangan dari golf, itu yang bisa dilakukan. Kalau rusak kita harus ganti langsung secara sodong namanya. Itu solusi paling dekat karena 3 bulan. Kalau jangka panjang ganti rumput yang tahan sodong," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meninjau Jakarta International Stadium (JIS). Peninjauan disebut sebagai salah satu persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk memutuskan stadion-stadion mana saja yang akan dipakai.

Dilansir detikNews, Stadion JIS menjadi salah satu stadion di Jakarta yang berpotensi digunakan sebagai venue Piala Dunia U-17. Akan tetapi, ada beberapa masalah di stadion yang harus segera diperbaiki di antaranya persoalan rumput yang tidak memenuhi standar FIFA.

Untuk menghadapi Piala Dunia U-17 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Ternyata tak hanya rumput stadion, beberapa fasilitas ini juga disinyalir akan direnovasi karena tak memenuhi standar.

Pemerintah juga akan membangun jembatan untuk menghubungkan stasiun kereta dengan stadion. "Jadi akan kita bangun jembatan supaya lebih cepat, kemudian juga untuk stasiun-stasiun kereta api kalau ada dari stasiun bahas itu kita akan bawa ke sini," kata Basuki.

Sejalan dengan adanya jembatan ini, pemerintah akan merampungkan proyek stasiun KRL sementara di JIS untuk mempermudah akses menuju transportasi umum. Saat ini

pembangunan tersebut sedang digarap PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan diperkirakan sudah bisa beroperasi pada November 2023.

Akses masuk dan keluar stadion juga menjadi perdebatan karena dinilai terbatas. Pasalnya saat ini JIS hanya memiliki satu akses masuk dan keluar stadion. Pemerintah pun berencana menambah akses pintu keluar masuk menjadi lima pintu, untuk menghindari kejadian yang berkaitan dengan keamanan pengunjung. Selain itu, Kementerian PUPR juga berencana membangun jembatan penyebrangan orang menuju pintu karnaval Ancol di sisi timur stadion.

"Jadi akan kita tambah lagi lima akses lagi untuk baik itu dengan jembatan-jembatan penyebrangan karena kemarin pengalaman menurut Jakmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kalau mau ke sini harus muter," jelas Menteri PUPR pada Selasa (4/7/2023).

Kemudian, masalah lain yang juga terus menjadi perdebatan dari awal JIS dibangun adalah tempat parkirnya. Pemerintah melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo berencana menambah area parkir di JIS.

Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, akan menjadi kantong parkir Jakarta International Stadium (JIS). ITF memiliki satu pintu yang berada persis di seberang JIS. Lahan ini juga memiliki dua akses pintu, yakni akses pintu barat dan akses pintu timur yang dinilai cocok untuk kantong parkir JIS. "Kantong parkir akan ditambah di kampung. Luas lahannya sekitar 5.000 meter," kata Syafrin. (lut/dya)



CINTA LAURA

LUNCURKAN DUA KAMPANYE SOSIAL LINGKUNGAN

Foto-Foto : Instagram/claurakiehl

STARTUP ritel kopi lokal Fore Coffee merayakan ulang tahun kelimanya dengan meluncurkan kampanye sosial “FOREsentially You” dan “FOREsponsible” untuk mewujudkan komitmen ESG (Environmental, Social, dan Corporate Governance) bersama duta produk mereka, Cinta Laura Kiehl.

Kampanye “FOREsentially You” merupakan gerakan untuk menegaskan pentingnya pemahaman dan penerimaan jati diri guna terus berdaya dan berkarya secara positif. Kampanye tersebut diinisiasi karena berdasarkan hasil riset Fore Coffee, tercatat delapan dari 10 anak muda mengalami krisis identitas dan isu percaya diri karena berbagai faktor.

“Melalui kolaborasi bersama Fore Coffee, kita bersama-sama menyoroti isu ini untuk mematahkan stigma negatif akan krisis identitas diri dan mendukung setiap individu untuk dapat berperan aktif dan berdampak bagi sekitar,” kata Cinta Laura.

Menurut Cinta Laura, kampanye tersebut dapat menumbuhkan kesadaran atas kemampuan diri sendiri, berani bertindak dan tidak tergantung pada pendapat negatif orang lain. Dengan memiliki kepercayaan diri, dia yakin setiap generasi muda mampu menjadi teladan dan penggerak untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Fore Coffee yang kelima, Fore juga meluncurkan menu edisi spesial Buttercream Temptations yang terdiri dari Buttercream Latte, Buttercream Tiramisu Latte, dan Light

Buttercream Latte. Menu tersebut dapat dipesan di gerai mereka secara langsung maupun aplikasi pemesanan daring Fore Coffee.

Profil Cinta Laura

Gadis pemilik nama asli Cinta Laura Kiehl ini lahir di Quakenbrück, Jerman pada 17 Agustus 1993. Masa kecil hingga remaja banyak ia habiskan dengan berada di luar negeri mengikuti tugas ayah yang menjadi General Manager Grand Hyatt Hotel.

Cinta Laura memulai debutnya di dunia hiburan dengan mengikuti lomba model. Ia berhasil sebagai finalis Top Model 2006 pada usia 13 tahun.

Sebagai salah satu model pemula, tak langsung membuat Cinta Laura tampil di layar televisi. Selama empat bulan pertama dalam kontrak dengan MD Entertainment, Cinta belum melakukan syuting sinetron. Dia harus mengikuti kursus bahasa Indonesia dan latihan akting.

Tahun berikutnya, Cinta mulai merasakan dunia seni peran. Sinetron perdananya adalah Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi) yang tayang pada tahun 2007. Dalam sinetron ini, logat dan aksen Cinta Laura yang campur aduk antara bahasa Indonesia dan Inggris membetot perhatian penonton dan mendorong popularitasnya.

Kesuksesan yang ia raih pada penampilan perdananya membuat Cinta kembali mendapat peran utama pada empat judul sinetron antara lain bertajuk Cinta, I Love You, Oh Baby!,

serta Upik Abu dan Laura.

Sinetron-sinetronnya kembali meraih perhatian penonton. Di tahun yang sama, Cinta juga bermain dalam layar lebar perdananya, film berjudul Oh Baby. Di Film ini, Cinta Laura menyumbangkan suaranya untuk lagu tema film tersebut.

Karier yang baru seumur jagung di dunia sinetron membuat putri pasangan Michael Kiehl dan Herdiana juga merambah dunia tarik suara. Selain menyanyikan lagu tema Oh Baby, Cinta juga bernyanyi mengisi lagu tema untuk sinetron Upik Abu dan Laura berjudul You Say AQ.

Pada tahun 2009 selain membintangi sinetron Air Mata Cinta, Cinta Laura juga semakin mengembangkan karier di dunia tarik suara. Duo Maia menggandengnya bernyanyi bersama dalam Pengkhianat Cinta.

Cinta Laura tak berhenti sampai di situ. Album OST Beat Hits yang dirilis tahun yang sama memuat duet antara Cinta dan Afgan.

Menginjak usia remaja berumur 17 tahun, Cinta menghentak dunia hiburan dengan merilis album terbarunya bertitel Cinta atau Uang. Di sini ia tetap mengedepankan irama beat. Kegemarannya akan tarian ia maksimalkan dalam video klip lagu ini.

Di sela-sela kesibukan syuting sinetron dan menyanyi, bintang iklan kursus bahasa Inggris, English First ini juga mengajar bahasa Inggris anak-anak yang tidak mampu.

Tak hanya bekerjasama dengan penyanyi Indonesia, pada tahun 2011, Cinta berkolaborasi bersama penyanyi

Guy Sebastian, pemenang Australian Idol 2003 dengan lagu bertajuk Who’s The Girl. Lagu ini sukses menduduki peringkat teratas di beberapa chart Australia dan Selandia Baru.

Setelah itu, Cinta kembali mengasah olah vokalnya dengan berduet bersama Inul Daratista dengan lagu Cinta Mati 2. Hal paling unik di sini yaitu mereka berasal dari genre musik berbeda. Electropop dan dangdut bertemu di sini dengan iringan musik orchestra dari Aminoto Kosin Orchestra.

Pada tahun selanjutnya, Cinta yang semakin dewasa merekam dua lagu di Los Angeles. Single pertamanya bertajuk Tulalit sukses dia nyanyikan bersama Rayi (RAN). Cinta pun menelurkan album baru di tahun 2012 bertajuk Hollywood Dreams bergenre dance dengan total 11 trak.

Sukses dengan sinetron dan menyanyi, Cinta pun menjajal dunia bisnis. Ia membangun bisnis fashion dengan brand CLK yang diambil dari inisial namanya. Barang-barang yang dijual yaitu hand bag, aksesoris, dan tas. Copyright CLK ini telah diakui di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam.

Dengan memiliki sederet pengalaman, popularitas, wajah blasteran, dan kemampuan bahasa asing makin memudahkan Cinta Laura menancapkan kakinya di dunia internasional (berbagai sumber)



“Melalui kolaborasi bersama Fore Coffee, kita bersama-sama menyoroti isu ini untuk mematahkan stigma negatif akan krisis identitas diri dan mendukung setiap individu untuk dapat berperan aktif dan berdampak bagi sekitar,”

CINTA LAURA



5 TIPS UNTUK MENGOBATI BATUK KARENA POLUSI UDARA

POLUSI udara menyebabkan berbagai masalah pernapasan bagi mereka yang menghirupnya. Salah satu masalah pernapasan yang muncul adalah batuk.

Polusi udara didefinisikan sebagai adanya zat berbahaya di atmosfer atau gas yang ada di udara.

Kondisi ini disebabkan oleh polutan dalam emisi mobil, partikel debu, pelepasan bahan kimia dari proses manufaktur dan urbanisasi, dan dari spora jamur yang mungkin tersuspensi di udara.

Anda yang tinggal di kota besar dengan indeks kualitas udara buruk, maka kamu wajib hati-hati. Sebab

kemungkinan kamu menderita batuk sangatlah besar.

Batuk adalah refluks yang tiba-tiba dan kuat yang membersihkan tenggorokan dari lendir (cairan normal, licin, dan berserabut di hidung) atau benda asing.

Meskipun batuk bukanlah masalah kesehatan yang serius, batuk apa pun yang berlangsung lebih dari 3 minggu (disebut batuk kronis), dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang serius. Dilansir dari jurnal kesehatan Oxford, berikut adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengobati batuk karena polusi udara.

1. Minum teh jahe atau teh madu

Teh jahe dan madu adalah pengobatan rumahan kuno untuk bisa membantu tenggorokan kamu melawan iritasi akibat polusi udara.

Anda bisa menyeduh teh sembari menambahkan sekitar 20-40 gram irisan jahe ke dalam secangkir air panas. Biarkan terendam selama sekitar 5 menit lalu tambahkan madu sesuai kebutuhan.

2. Gunakan masker saat keluar rumah

Menggunakan masker dapat

mengurangi dampak paparan polusi udara dalam jangka pendek. Masker wajah menyaring partikel di udara dan bertindak sebagai pelindung terhadap polutan udara berbahaya.

Masker dengan peringkat N95 diketahui menyaring sekitar 95% partikel di udara. Masker bedah atau medis dan masker kain tidak seefektif masker N95 namun memberikan perlindungan terhadap polusi udara.

3. Minum air putih sekukupnya

Jangan lupa untuk tetap terhidrasi. Ini akan mengencerkan lendir dan menjaga kelembapan hidung dan tenggorokan. Dengan tubuh yang terhidrasi dengan baik, maka ini bisa mengurangi iritasi di tenggorokan dan membantu mengurangi batuk.

4. Istirahat yang cukup

Istirahat yang cukup sangat penting untuk kesehatan kamu. Jika kamu mengalami batuk berlebihan, ingatlah untuk meninggikan kepala dengan 2-3 bantal di malam hari, agar kepala tetap berada di atas jantung.

5. Kunjungi dokter

Jika batuk tak kunjung membaik dalam satu bulan, silahkan menghubungi dokter untuk mendapatkan

pertolongan lebih lanjut.

Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat apa pun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya.

Ini dapat menyebabkan atau berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan. Mulai dari yang ringan, hingga yang parah dan berbahaya.

Gas dan partikel berbahaya di udara berasal dari berbagai sumber. Termasuk asap knalpot kendaraan, asap dari pembakaran batu bara atau gas, dan asap tembakau (bisnis)



INDIA NEGARA PERTAMA MENDARAT DI KUTUB SELATAN BULAN

PESAWAT ruang angkasa India pada Rabu (23/8/2023) menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan Bulan yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, dalam sebuah misi yang dianggap penting untuk eksplorasi bulan dan kedudukan India sebagai kekuatan antariksa.

Mendaratnya pesawat ruang angkasa India di kutub selatan Bulan itu hanya beberapa hari setelah pesawat pendarat serupa milik Rusia terhempas.

Para ilmuwan dan pejabat bertepuk tangan, bersorak dan berpelukan ketika pesawat ruang angkasa itu mendarat, serta orang-orang di seluruh India merayakannya, menyalakan petasan dan menari di jalanan.

"India berada di bulan," kata S. Somanath, kepala Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO) saat Chandrayaan-3 mendarat, menjadikan India negara keempat yang berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasa di bulan setelah Amerika Serikat, China dan Uni Soviet.

ISRO menyebarkan gambar dari pesawat ruang angkasa yang menunjukkan permukaan Bulan serta kaki dan bayangan pendarat.

Medan yang berat membuat pendaratan di kutub selatan menjadi sulit, namun kandungan es di wilayah tersebut dapat memasok bahan bakar, oksigen, dan air minum untuk misi di masa depan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada India melalui pesan kepada Modi yang dipublikasikan di situs resmi Kremlin.

"Ini merupakan langkah maju yang besar dalam eksplorasi luar angkasa dan tentunya merupakan bukti kemajuan mengesankan yang dicapai India di bidang sains dan teknologi," ujarnya.

Administrator NASA Bill Nelson mengucapkan selamat kepada ISRO atas pendaratan tersebut.

"Selamat kepada India karena menjadi negara ke-4 yang berhasil melakukan pendaratan lunak pesawat luar angkasa di Bulan. Kami senang menjadi mitra Anda dalam misi ini!" ujarnya di X (Twitter).

Hal ini adalah upaya kedua India untuk mendaratkan pesawat luar angkasa di bulan dan dilakukan kurang dari sepekan setelah misi Luna-25 Rusia gagal. Orang-orang di seluruh negeri terpaku pada layar televisi dan berdoa ketika pesawat ruang angkasa itu mendekati permukaan.

Hampir sebanyak 7 juta orang menonton siaran langsung YouTube.

Chandrayaan berarti "kendaraan Bulan" dalam bahasa Hindi dan Sanskerta. Pada tahun 2019, misi Chandrayaan-2 ISRO berhasil mengerahkan pengorbit tetapi pendaratnya jatuh.

Chandrayaan-3 diperkirakan akan tetap berfungsi selama dua pekan, menjalankan serangkaian eksperimen termasuk analisis spektrometer komposisi mineral permukaan bulan.

Penjelajah Bulan akan membutuhkan waktu beberapa jam atau satu hari untuk keluar dari pesawat ruang angkasa, kata Somanath kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa pendaratan tersebut telah memberikan kepercayaan diri kepada India untuk memperluas jangkauannya ke kemungkinan perjalanan ke Mars dan Venus.

India juga berencana meluncurkan misi pada bulan September untuk mempelajari matahari, kata Somanath.

Penerbangan luar angkasa berawak juga direncanakan dan, meskipun belum ada tanggal resmi yang diumumkan, persiapannya



kemungkinan dilakukan pada 2024.

Pendaratan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi India dalam bidang rekayasa luar angkasa yang hemat biaya. Chandrayaan-3 diluncurkan dengan anggaran sekitar 6,15 miliar rupee (Rp1,12 triliun), lebih murah dibandingkan biaya produksi film thriller luar angkasa Hollywood tahun 2013 "Gravity".

"Pendaratan di kutub selatan sebenarnya akan memungkinkan India untuk mengeksplorasi apakah ada air es di Bulan. Dan ini sangat penting untuk data kumulatif dan ilmu pengetahuan tentang geologi Bulan," kata Carla Filotico, rekanan dan direktur pelaksana di konsultansi Mitra SpaceTec.

Antisipasi sebelum pendaratan sangat tinggi, dengan tajuk utama di surat kabar dan saluran berita India yang memuat hitungan mundur menuju pendaratan.

Doa diadakan di tempat-tempat ibadah di seluruh negeri, dan anak-anak sekolah melambaikan tiga warna India sambil menunggu pemutaran langsung dari peristiwa pendaratan tersebut (Ant)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KIAT MENJAGA KUALITAS UDARA DI RUMAH

AKHIR-akhir ini masyarakat - terutama yang berdomisili di Jakarta, dihegipati kekhawatiran akibat polusi udara yang kian memburuk.

Untuk menghindari paparan polusi, sejumlah kantor kembali menerapkan sistem work from home (WFH) alias bekerja dari rumah.

Perusahaan teknologi bidang konstruksi Gravel mengingatkan mereka yang berada di rumah untuk menjaga kualitas udara di rumah demi kesehatan.

"Jangan sampai Anda dan keluarga tidak aman dari paparan polusi di dalam rumah sendiri. Segera cek dan pastikan kondisi rumah Anda aman," kata CEO dan salah seorang pendiri Gravel Georgi Ferdwindra Putra, di Jakarta.

Gravel menyarankan masyarakat memasang air purifier atau pemurni udara di rumah, yang bisa ditempatkan di dekat jendela dan ruang keluarga.

Jika ingin membuka pintu dan

jendela, hindari membuka berlebihan supaya tidak banyak udara dari luar masuk ke dalam rumah.

Selain itu, perhatikan juga waktu untuk membuka pintu dan jendela, sebaiknya ketika polusi udara sedang tidak tinggi.

Jika tinggal di gedung bertingkat di kawasan sibuk, pastikan tidak membuka jendela saat jam-jam sibuk.

Lihat keramaian lalu lintas dan aktivitas industri sebelum membuka jendela supaya sirkulasi udara tetap bersih dan sehat.

Udara di dalam ruangan bisa menjadi terlalu jenuh jika terlalu sering menutup pintu dan jendela.

Supaya tidak pengap, gunakan kipas exhaust yang bisa membawa udara lembap dan panas ke luar rumah.

Kipas exhaust juga bisa membantu sirkulasi udara tetap berjalan dan mengurangi akumulasi polutan dalam ruangan.

Gravel juga menyarankan menggunakan seal (segel) karet pada celah pintu dan jendela untuk membantu menghalangi udara luar yang kotor masuk ke rumah.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan fitur recirculate pada air conditioner (AC), yang akan mengolah udara di dalam rumah untuk disaring dan didinginkan, kemudian masuk lagi ke dalam rumah tanpa mengambil udara dari luar sama sekali.

Selain cara-cara di atas, Gravel juga mengingatkan untuk rutin membersihkan rumah untuk mengurangi akumulasi debu dan partikel lain yang bisa memengaruhi kualitas udara.

Mengutip halodoc, polusi udara menjadi masalah yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat.

Udara yang bercampur dengan sisa produksi pabrik, sisa rumah tangga, pembakaran sampah, hingga asap kendaraan bermotor, membuat udara memiliki kandungan polutan yang sangat tinggi.

Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan.

Bukan hanya pada sistem pernapasan, udara yang kotor juga dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak hingga ibu hamil.

Polusi udara adalah kontaminasi yang terjadi akibat banyaknya polutan pada udara. Polutan dapat berupa partikel kecil yang muncul secara alami maupun buatan.

Polutan yang alami biasanya terdiri dari debu, serbuk sari, permukaan tanah, hingga munculnya nitrogen atau gas berbahaya lainnya.

Sementara itu, polutan buatan bisa terjadi akibat aktivitas kendaraan bermotor, pembakaran sisa industri, bahan kimia rumah tangga, bahan bangunan, hingga asap tembakau.

Tentunya kondisi ini dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada kesehatan. Selain gangguan pada pernapasan, udara yang buruk juga dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dan memicu gangguan pada kehamilan (Antara-berbagai sumber)



"Jangan sampai Anda dan keluarga tidak aman dari paparan polusi di dalam rumah sendiri. Segera cek dan pastikan kondisi rumah Anda aman,"

GEORGI FERDWINDRA PUTRA
CEO GRAVEL



Mahasiswa (dari hal 1)

MAHASISWA S1 atau D4 tidak lagi wajib dikenakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Syaratnya, prodi mahasiswa bersangkutan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sejenis.

Sedangkan bagi mahasiswa yang belum menjalani kurikulum berbasis proyek, maka syarat lulus kuliahnya yaitu tugas akhir yang juga tidak harus berbentuk skripsi. Bentuk lainnya yaitu prototipe, proyek, maupun bentuk sejenis lainnya. Tugas akhir ini juga dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok.

Aturan di atas tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan terbaru ini diluncurkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, Selasa (29/8/2023).

"Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe. Bisa berbentuk proyek. Bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya skripsi atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis atau disertasi, tetapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi," kata Nadiem

Nadiem menjelaskan, seharusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan bagaimana cara pihaknya mengukur standar capaian kelulusan mereka. Untuk itu, kini standar terkait capaian lulusan ini tidak dijabarkan secara rinci lagi di Standar Nasional Pendidikan tinggi.

"Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi," ucapnya.

Ia menuturkan, pada aturan sebelumnya, kompetensi sikap dan pengetahuan dijabarkan terpisah dan secara rinci. Untuk itu, mahasiswa sarjana dan sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Mahasiswa magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi, sementara doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.

"Tetapi di dunia sekarang, ada berbagai macam cara untuk

menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh, kebijakan ini, legacy (sebelumnya) ini. Karena ada berbagai macam program, prodi, yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya dengan cara lain," imbuhnya.

Nadiem mencontohkan, kompetensi seseorang di bidang technical tidak lantas tepat diukur dengan penulisan karya ilmiah. Ia menjelaskan, Kemendikbudristek pun meresponsnya dengan perbaikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan sifat framework (kerangka). Harapannya, tiap prodi dapat lebih leluasa menentukan syarat kompetensi lulusan lewat skripsi ataupun bentuk lainnya.

"Dalam akademik juga sama. Misalnya kemampuan orang dalam konservasi lingkungan, apakah yang mau kita tes itu kemampuan mereka menulis atau skripsi secara scientific? Atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi project di lapangan? Ini harusnya bukan Kemendikbudristek yang menentukan," katanya.

Sementara, bagi mahasiswa S2 dan S3 atau magister dan doktoral, tesis dan disertasi tidak lagi wajib masuk jurnal. "Jadi ini transformasi yang radikal, kami memberikan kepercayaan kembali pada setiap kepala prodi, kepercayaan kembali pada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan 'oke, mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat dengan teknologi, evolusi industri, mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya yang tidak lagi membebankan tanpa alasan'," imbuhnya.

Nadiem mengatakan, pada aturan sebelumnya, mahasiswa magister atau magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Sementara itu, mahasiswa doktor atau doktor terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.

Aturan IPK Juga Berubah

Indeks prestasi atau IP tidak lagi jadi satu-satunya bentuk penilaian mata kuliah. Namun, kini ada bentuk lulus atau tidak lulus (pass/fail).

Ketentuan di atas berlaku khusus pada mata kuliah yang berbentuk

kegiatan di luar kelas. Contohnya yakni kegiatan Kampus Merdeka maupun uji kompetensi. Nah, mata kuliah pass/fail ini tidak masuk dalam perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Nadiem mengatakan, aturan baru IP ini membuat penilaian indeks prestasi yang kaku tidak lagi dipaksakan pada kegiatan di luar kelas maupun pada uji kompetensi. "Tadinya diatur secara spesifik: satu SKS tetap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, semuanya harus ada penilaian, harus ada angkanya yang berkontribusi kepada IPK (indeks prestasi kumulatif). Bapak, Ibu, kekakuan kebijakan ini sudah tidak relevan lagi," kata Nadiem.

"Di era di mana banyak sekali murid-murid, mahasiswa, ke luar kampus mengerjakan hal lain: mengerjakan project, atau mereka mendapatkan suatu sertifikasi kompetensi. Di mana nggak ada tuh angka sertifikasi kompetensi. Adanya adalah dia menyelesaikan, dia berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi itu atau tidak. Itulah logikanya pass/fail," terang Nadiem.

Ia menegaskan, Kemendikbudristek kini mengenalkan bahwa boleh menggunakan penilaian pass/fail pada SKS mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas, terutama untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Terpisah, Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan setuju dengan kebijakan bahwa skripsi bukan satu-satunya syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 dan D4.

"Sekarang juga skripsi kalau tidak dijadikan artikel jurnal atau referensi, untuk apa juga menumpuk di perpustakaan," ujar Cecep, Selasa (29/8/2023).

Sebelum muncul kebijakan ini, kata dia, beberapa perguruan tinggi pun sudah menerapkan. Salah satunya Universitas Terbuka. "Di UT itu kan tidak ada skripsi, tapi lulusannya ada yang bisa melanjutkan ke Universitas Indonesia (UI) dan perguruan tinggi lain," katanya.

Hanya, kata dia, yang perlu diperjelas adalah bentuk lain dari skripsi itu seperti apa. Setiap prodi, kata Cecep, harus menyiapkan pilihan kepada mahasiswa apakah ingin tetap

membuat skripsi atau diganti bentuk lain. "Bukan berarti tidak boleh skripsi, tapi boleh bentuk lain. Misalnya, kalau menganggap disiplin ilmu ini cocoknya skripsi, ya skripsi." (wid,rls, ist/dya)

ATURAN BARU BAGI MAHASISWA

(Berdasarkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

lanjutan Berita dari hal 1....

ATURAN S2

- Beban belajar magister dan magister terapan berkisar 54-72 SKS dalam masa tempuh kurikulum 3-4 semester
- Mahasiswa magister dan magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- Kompetensi utama lulusan magister yaitu minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif
- Kompetensi utama lulusan program magister terapan yaitu minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu

ATURAN S3

- Masa tempuh kurikulum program doktor atau doktor terapan dirancang sepanjang 6 semester, dengan 2 semester pembelajaran mendukung penelitian dan 4 semester penelitian
- 2 Semester pembelajaran doktor atau doktor terapan dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang punya pengetahuan serta kompetensi mencukupi untuk melakukan penelitian
- Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
- Kompetensi lulusan doktor yaitu minimal menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, lalu mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji
- Kompetensi lulusan doktor terapan yaitu minimal mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, lalu mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu

ATURAN IP MAHASISWA

- Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam IP atau keterangan lulus atau tidak lulus (pass/fail)
- Bentuk penilaian IP dinyatakan dalam kisaran:
 - A setara dengan 4
 - B setara dengan 3
 - C setara dengan 2
 - D setara dengan 1
 - E setara dengan 0
- Perguruan tinggi bisa memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf A-E dan angka 4-0 tersebut
- Keterangan lulus atau tidak lulus (pass/fail) bisa dipakai di mata kuliah yang bentuknya kegiatan di luar kelas dan atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi
- Hasil penilaian capaian pembelajaran per semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) semester, sedangkan hasil di akhir studi dinyatakan dengan IP kumulatif (IPK)
- IP semester dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian IP



Uji Materi PKPU soal Keterwakilan Perempuan Pemilu 2024 MA Kabulkan Gugatan, KPU Sebut Tak Pengaruhi DCS



(Ilustrasi) Hanya ada 20 persen perempuan di parlemen Indonesia hasil Pemilu 2019. Tampak, anggota DPR perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan berpose bersama seusai pelantikan. (Courtesy: PDI-P)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Perludem soal keterwakilan perempuan di Pemilu 2024. Namun MA belum melansir amar putusan secara lengkap. "Kabul keberatan permohonan HUM (Hak Uji Materi)," demikian bunyi amar singkat MA yang dilansir website-nya, Selasa (29/8/2023).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan, putusan tersebut tidak akan mengubah daftar calon sementara (DCS) yang sudah dirilis. Hasyim mengatakan, berdasarkan DCS, semua partai politik sudah memenuhi, bahkan melampaui syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).

"Sesungguhnya kalau kita cek satu per satu, masing-masing partai politik per dapil keterwakilan perempuan yang diusulkan itu sudah mencukupi, melampaui 30 persen, dan itu sudah diumumkan KPU dalam DCS," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Aturan yang dimaksud yaitu Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Dalam pasal itu, KPU mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.

Sebagai misal, jika di suatu dapil terdapat 8 caleg, jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang desimal kurang dari 5, berlaku pembulatan ke bawah. Akibatnya, keterwakilan perempuan dari total 8 caleg di dapil itu cukup hanya 2 orang dan itu dianggap sudah memenuhi syarat. Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimal keterwakilan perempuan 30 persen sebagaimana dipersyaratkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hasyim pun mengaku bakal mengecek isi putusan MA tersebut. Ia berjanji KPU akan memperbaiki aturan yang ada bila dinyatakan keliru oleh MA. "Kalau memang benar ada putusan itu kan peraturan KPU tentang pencalonan DPR ya yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30 persen itu cara hitungnya berarti dianggap salah, nanti kita menyesuaikan itu," ujar Hasyim.

Diajukan Purludem

Judicial review itu diajukan oleh Perludem dan diputus oleh ketua majelis Irfan Fachrudin. Adapun anggota majelis Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi. "Tanggal putus 29 Agustus 2023," ujarnya.

"Ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat," kata jurid MA Suharto saat dihubungi terpisah.

Sebagaimana diketahui, Perludem menggugat PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 terkait perhitungan pembulatan jumlah keterwakilan perempuan. Perludem menilai PKPU tersebut dianggap mendiskriminasi keterwakilan perempuan di parlemen.

"Koalisi peduli keterwakilan perempuan resmi mengajukan judicial review Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang utamanya terkait dengan kekeliruan KPU dalam menyusun norma peraturan KPU. Terkait dengan minimal 30 persen perempuan harus disertakan di setiap daerah pemilihan dari pencalonan anggota legislatif," kata Peneliti Perludem Fadhil Ramadhani.

Diketahui, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 8 yang digugat adalah dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan. Maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Fadhil mengatakan KPU tidak menepati janji untuk merevisi isi PKPU tersebut. Pihaknya pun mengajukan uji materi PKPU tersebut ke MA. Pemohon yang diajukan ke MA tersebut terdiri atas 5 pemohon.

"Karena setelah ditunggu beberapa lama KPU tidak menepati janjinya untuk merevisi peraturan KPU. Maka tidak ada pilihan lain selain mengajukan uji materi terhadap peraturan KPU ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Fadhil menuturkan pihaknya memohon kepada MA untuk membatalkan klausul pada PKPU tersebut. Menurutnya, perhitungan KPU keliru dan tidak sesuai UU Pemilu.

"Nah, lebih lengkapnya soal apa yang kami mohonkan tentu saja kita meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan klausul di dalam Peraturan KPU. Yang kemudian mem-buat minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon partai politik di setiap daerah pemilihan itu dibatalkan karena perhitungan KPU keliru, tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang pemilu," tuturnya. (wid, rls,ist/dya)



UJI MATERI YANG DIAJUKAN PERLUDEM

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 terkait perhitungan pembulatan jumlah keterwakilan perempuan.

PASAL ITU BERBUNYI:

- Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:
 - a. Kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
 - b. Lima puluh atau lebih hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

IMPLIKASI DARI PERATURAN TERSEBUT:

- Kurangnya keterwakilan perempuan dari 30 persen di beberapa dapil. Misalkan, pada dapil yang melaksanakan 8 caleg, maka 30 persen dari jumlah tersebut adalah 2,4.
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023, dilakukan pembulatan ke bawah dari 2,4 menjadi 2 orang, karena angka di belakang koma kurang dari 50.
- Dengan demikian, cukup mendaftarkan 2 orang untuk memenuhi kuota minimal. Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30 persen.